

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Nama Dokumen (Dokumen letak Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang-Undang	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik (Berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya dalam bentuk bulan/tahun)
				Dibuka	Ditutup	
1	Daftar riwayat hidup	Daftar Riwayah Hidup (DRH), (Nomor Rekening pegawai)	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h - UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Menjaga rahasia pribadi pegawai	Selama pegawai tidak memberikan persetujuan
2.	Surat-surat/memo/memorandum/nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	Nota dinas/Disposisi (hasil dari disposisi pimpinan)	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Memperlancar proses pelaksanaan tugasdan fungsi lembaga	Tidak Terbatas
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Dokumen Kontrak	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j • Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan premature	Menimbulkan persaingan sehat dalam proses pengadaan barang/ jasa	Tidak Terbatas
4.	Dokumen Kontrak	Dokumen Kontrak	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j • UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan	Muncul persaingan yang tidak sehat	Muncul persaingan yang sehat	Tidak Terbatas

			Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23 • Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b			
5.	Dokumen penawaran penyedia barang/jasa	Dokumen Kontrak	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17huruf j • Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Apabila dibuka dan diberikan dapatmengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Muncul persainganyang sehat	Sampai dengan proses selesai
6.	Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa, termasuk Berita AcaraPenjelasanPekerjaan (Aanwijzing), evaluasi penawaran/ kualifikasi/hasil lelang	Dokumen Kontrak	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17huruf j • Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 6 Huruf b	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Muncul persainganyang sehat	Sampai dengan proses selesai
7.	Prosespenyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sanggah/sanggah banding	Dokumen Kontrak	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17huruf j • Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 6 Huruf b	Apabila dibuka dandiberikan dapatmengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Muncul persaingan yang sehat	Sampai dengan proses selesai

8.	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan SPP,SPM,SP2D	Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17huruf j • UU Nomor 7 Tahun 1992. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 28 Pasal 40	Informasi terkait dengan identitas rekening orang	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	20 Tahun
9.	Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	Laporan Hasil Pemeriksaan	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17huruf a dan i • Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/20 08 tentang Kode Etik Pengawas	Penyalahgunaan pihaklain	Dapat mengandung informasi rahasia institusi / merugikan institusi	Tidak Terbatas
10.	Laporan Harta Kekayaan Pejabat	LHKPN	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17huruf h • Keputusan KPK Nomor Kep.07/KPK /02/2005 tentang Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan HartaKekayaan Penyelenggara Negara Pasal 5 Ayat (7)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai danuntuk menghindari kejahatan	• Berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidakbertanggung jawab • Mengungkap rahasia pribadi yaitu kondisikeuangan, aset,pendapatan, dan rekening bank seseorang	Selama pejabat memberikan persetujuan
11.	Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	Laporan hasil Pemeriksaan	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i • Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/20 08 tentang Kode Etik	Penyalahgunaan pihaklain dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi	Mencegah citra yang negatif terhadap institusi	Tidak Terbatas

			Pengawas			
12.	Akses Ruang Server	Ruang Server	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Menjaga/melindungi hak akses	Tidak Terbatas
13.	Internet Protocol (IP)Address	Internet Protocol (IP) Address	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Keamanan Sistem/ Jaringan	Tidak Terbatas
14.	Kode Akses Elektronik	Kode Akses Elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 16	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Keamanan Sistem	Tidak Terbatas
15.	Data usulan Promosi dan Mutasi PNS dalam jabatan structural/fungsional dan notulensi hasil rapat tim penilai kinerja	Dokumen/Notulen/Risalah hasil rapat	- Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Menjaga iklim kondusif dilingkungan kerja	Tidak Terbatas
16.	Rekam Medik/hasil cek up perorangan PNS/Pejabat	Hasil Relkam Medis	Pasal 17 huruf i Undang-undang	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

			Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan			
17.	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Data rencana penempatan CPNS/PNS	• Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
18.	Data rencana penempatan CPNS/PNS	Data rencana penempatan CPNS/PNS	• Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah Kolusi	Sampai dengan penyerahan SK
19.	Data pribadi klien bantuan hukum	Data pribadi klien bantuan hukum	• Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Pelanggaran Hak Asasi Manusia (terkait dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak privasi	Tidak Terbatas
20.	Soal Tes CPNS	Soal Tes CPNS	• Pasal 17 huruf l Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman hasil tes

21.	Berita Acara Pemeriksaan Hukdis PNS	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	• Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik •	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Melindungi hak privasi	Sampai keluar hasil hukuman disiplin
-----	-------------------------------------	--------------------------------	---	--	------------------------	--------------------------------------

Menyetujui,

a.n. Kepala Badan Kepegawaian Daerah



Dr. Nurhayati Nufus, SE,MM,M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 196908202001122001